

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara besar yang mana ketersediaan pangan harus tetap terjaga agar tidak terjadinya kelangkaan pangan. Dalam hal itu menjadi salah satu pilar penting dalam menyediakan sumber daya pangan produk asal hewan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Selain produk hewan yang dihasilkan juga perlu adanya pengawasan terhadap kesehatan hewan agar tidak adanya penyebaran penyakit melalui hewan. Indonesia juga merupakan Negara besar yang terdiri dari beberapa provinsi dengan wilayah sebaran ternak maka penjagaan mutu produk asal hewan dan kesehatan hewan harus dijaga secara menyeluruh selain ternak, pemerintah juga harus mengawasi kesehatan hewan.

Dalam penanganan ketersediaan produk asal hewan dan kesehatan hewan pemerintah Indonesia membuat sebuah lembaga khusus yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan pada setiap provinsi yaitu Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan pada setiap daerahnya di Indonesia yang bertugas menghasilkan pendapatan. Untuk mewujudkan ketersediaan produk asal hewan dan kesehatan hewan tersebut Provinsi Jawa Tengah membentuk dinas yang untuk membidangi khususnya dalam bidang ternak dan kesehatan hewan di Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah suatu dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga kebutuhan pangan nasional dengan komoditas utama berupa daging, telur, dan susu. Untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan tersebut, maka terbentuklah Dinas Peternakan Dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah (DINAKKESWAN) melalui penerimaan retribusi daerah. Dengan adanya penerimaan retribusi diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah hal itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, dan efisien serta akuntabel, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah yang optimal.

Retribusi yang terdapat pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Jawa Tengah yaitu Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan yang didalamnya yaitu ada pemakaian ruangan, pemakaian bangunan (rumah dinas) dan pemakaian lahan / tanah. Pada Dinas Peternakan

Dan Kesehatan Hewan terdapat retribusi Penggunaan Laboratorium dan Pelayanan, pelayanan pada laboratorium tersebut terdapat pelayanan diagnose penyakit hewan di laboratorium, pelayanan pencegahan, pemberantasan, penolakan penyakit hewan dan reproduksi ternak, pelayanan kesmavet (pengujian produk hewan) di laboratorium, pelayanan Kesehatan hewan dan pelayanan pengujian pakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentunya memiliki Penjualan Usaha Daerah yang didapat dari penjualan bibit ternak, penjualan benih ternak penjualan ternak aktif / TLB, penjualan ternak potong dan penjualan produksi susu. Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan juga terdapat Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu hasil dari penerimaan ganti rugi asset tidak bergerak, yang dimaksud dari asset tidak bergerak yaitu terdapat lahan Dinas yang terpakai untuk pembuatan jalan tol yang sampai saat ini belum terrealisasi anggarannya.

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menggunakan data tahun 2016-2018. Dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa pada tahun 2016 anggaran hasil retribusi daerah sebesar Rp. 5.249.827.000 dan realisasi Rp. 5.627.350.550, pada tahun 2017 anggaran sebesar Rp. 5.582.339.000 dan realisasi Rp. 5.714.218.140 pada tahun terakhir 2018 anggaran sebesar Rp. 18.323.473.000 dan realisasi Rp. 6.0003.014.300. dapat dilihat dari data tersebut hasil retribusi daerah mengalami fluktuasi. Karena pada tahun 2016 ke 2017 hasil retribusi mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan.

Dalam menjalankan kegiatan penerimaan pendapatan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai sistem yaitu sistem penerimaan pendapatan yang dijalankan oleh bendahara penerimaan. Sistem yang ada tersebut harus dikelola dengan baik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan bagi dinas Peternakan Dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil sebuah keputusan. Salah satu informasi yang didapat adalah informasi penerimaan pendapatan yaitu kas yang masuk adanya pendapatan retribusi.

Untuk mengelola Penerimaan mengingat strategisnya pendapatan yang bersumber dari Retribusi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, maka pengelolaan administrasi yang baik dirasa penting untuk dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab. Karena itu dibutuhkan suatu sistem dan prosedur yang mampu menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan yang mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jika penerimaan pendapatan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dinas yang ada maka akan menimbulkan terjadinya penyelewengan atau kecurangan dalam mengelola pendapatan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik prosedur penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh dinas, maka semakin akurat dan dapat dipercaya besarnya pendapatan yang dilaporkan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis sistem penerimaan pendapatan yang berjalan di Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah apakah sudah berjalan dengan baik. Karena untuk mencapai tujuan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai sistem kinerja yang baik. Dari latar belakang diatas maka penulis Menyusun laporan dengan judul “Analisis Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini berdasarkan maksud kegiatan penelitian diatas adalah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah yang ada pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah dan untuk mengetahui apakah Sistem dan Prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagi Penulis

- 1) Dapat mengetahui retribusi daerah yang terdapat pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah.
- 2) Dapat Mengetahui prosedur penyetoran retribusi daerah pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
- 3) Dapat mengetahui mekanisme pelaporan retribusi daerah pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah.

2. Bagi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerja dinas dalam prosedur penerimaan retribusi daerah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

